

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN  
TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG KELAS JABATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA  
RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAFTAR NAMA JABATAN STRUKTURAL, KELAS JABATAN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL		
1.	Menteri/Kepala	Tanpa Kelas
2.	Sekretaris Jenderal	17
3.	Direktur Jenderal Tata Ruang	17
4.	Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan	17
5.	Direktur Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan	17
6.	Direktur Jenderal Penataan Agraria	17
7.	Direktur Jenderal Pengadaan Tanah	17
8.	Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah	17
9.	Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah	17
10.	Inspektur Jenderal	17
11.	Direktur Konsolidasi Tanah	15
12.	Direktur Landreform	15
13.	Direktur Pemanfaatan Ruang	15
14.	Direktur Pemanfaatan Tanah Pemerintah	15
15.	Direktur Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat	15
16.	Direktur Pembinaan Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah	15
17.	Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah	15
18.	Direktur Penanganan Perkara Tanah dan Ruang	15
19.	Direktur Penataan Kawasan	15
20.	Direktur Penataan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	15
21.	Direktur Penatagunaan Tanah	15
22.	Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	15

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
23.	Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang	15
24.	Direktur Pengaturan dan Pendaftaran Hak Tanah, Ruang dan PPAT	15
25.	Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Tanah dan Ruang	15
26.	Direktur Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	15
27.	Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang	15
28.	Direktur Pengukuran dan Pemetaan Dasar	15
29.	Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	15
30.	Direktur Penilaian Tanah	15
31.	Direktur Perencanaan Tata Ruang	15
32.	Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I	15
33.	Direktur Sengketa dan Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II	15
34.	Direktur Survei dan Pemetaan Tematik	15
35.	Inspektorat Wilayah I	15
36.	Inspektorat Wilayah II	15
37.	Inspektorat Wilayah III	15
38.	Inspektorat Wilayah IV	15
39.	Inspektorat Wilayah V	15
40.	Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	15
41.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)	15
42.	Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian	15
43.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama	15
44.	Kepala Biro Umum dan Tata Usaha Pimpinan	15
45.	Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan, Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	15
46.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15
47.	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan	15
48.	Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	15
49.	Sekretaris Direktorat Jenderal	15
50.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15
51.	Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan	12
52.	Kepala Bagian Administrasi Umum	12
53.	Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum	12
54.	Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan	12
55.	Kepala Bagian Anggaran dan PNBPN	12
56.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat	12
57.	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Ortala	12
58.	Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum	12

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
59.	Kepala Bagian Kerja Sama	12
60.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	12
61.	Kepala Bagian Mutasi Kepegawaian	12
62.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	12
63.	Kepala Bagian Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program	12
64.	Kepala Bagian Penatausahaan Barang Milik Negara	12
65.	Kepala Bagian Pengembangan Pegawai	12
66.	Kepala Bagian Penyusunan Rencana	12
67.	Kepala Bagian Perbendaharaan dan Tata Laksana Keuangan	12
68.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan	12
69.	Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan	12
70.	Kepala Bagian Perundangan-Undangan	12
71.	Kepala Bagian Program	12
72.	Kepala Bagian Program dan Hukum	12
73.	Kepala Bagian Program dan Penganggaran	12
74.	Kepala Bagian Rumah Tangga	12
75.	Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Protokol	12
76.	Kepala Bagian Umum	12
77.	Kepala Bagian Umum Kepegawaian	12
78.	Kepala Bidang Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	12
79.	Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang	12
80.	Kepala Bidang Pengembangan dan Standarisasi Sistem Teknologi Informasi	12
81.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	12
82.	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	12
83.	Kepala Bidang Program dan Kerja Sama	12
84.	Kepala Bidang Publikasi dan Perpustakaan	12
85.	Kepala Subdirektorat Bina Pengadaan Tanah Pemerintah	12
86.	Kepala Subdirektorat Bina Zona dan Kendali Mutu Zona Nilai Tanah	12
87.	Kepala Subdirektorat Bina Zona Nilai Ekonomi Kawasan dan Kendali Mutu	12
88.	Kepala Subdirektorat Data dan Neraca Penatagunaan Tanah	12
89.	Kepala Subdirektorat Fasilitasi dan Kerja Sama	12
90.	Kepala Subdirektorat Inventarisasi dan Data	12

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
	Landreform	
91.	Kepala Subdirektorat Inventarisasi Potensi dan Pendampingan	12
92.	Kepala Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah I	12
93.	Kepala Subdirektorat Konflik Tanah dan Ruang Wilayah II	12
94.	Kepala Subdirektorat Pedoman Pemanfaatan Ruang	12
95.	Kepala Subdirektorat Pedoman Perencanaan Tata Ruang	12
96.	Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I	12
97.	Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II	12
98.	Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau	12
99.	Kepala Subdirektorat Pemanfaatan Tanah	12
100.	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi	12
101.	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Pemerintah	12
102.	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Non Pertanian	12
103.	Kepala Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Tanah Pertanian	12
104.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Wilayah I	12
105.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Wilayah II	12
106.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Wilayah III	12
107.	Kepala Subdirektorat Pembinaan Wilayah IV	12
108.	Kepala Subdirektorat Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang	12
109.	Kepala Subdirektorat Pemetaan Dasar dan Pembinaan Surveyor	12
110.	Kepala Subdirektorat Pemetaan Kadastral	12
111.	Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah I	12
112.	Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah II	12
113.	Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Tanah dan Ruang Wilayah III	12
114.	Kepala Subdirektorat Penataan dan Kerja Sama	12
115.	Kepala Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Pulau-Pulau Kecil	12
116.	Kepala Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu	12
117.	Kepala Subdirektorat Penataan dan Pemantauan Wilayah Pesisir	12

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
118.	Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan Baru	12
119.	Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan Ekonomi	12
120.	Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan Perdesaan	12
121.	Kepala Subdirektorat Penataan Kawasan Perkotaan	12
122.	Kepala Subdirektorat Penatagunaan Tanah Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	12
123.	Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah I	12
124.	Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pembatalan Wilayah II	12
125.	Kepala Subdirektorat Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang	12
126.	Kepala Subdirektorat Pendayagunaan Tanah Terlantar	12
127.	Kepala Subdirektorat Penertiban dan Penetapan Tanah Terlantar	12
128.	Kepala Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah I	12
129.	Kepala Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah II	12
130.	Kepala Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah III	12
131.	Kepala Subdirektorat Penertiban Pemanfaatan Ruang Wilayah IV	12
132.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal dan Perpanjangan Hak	12
133.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Atas Tanah Pemerintah	12
134.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Guna Usaha	12
135.	Kepala Subdirektorat Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai	12
136.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data Dasar	12
137.	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Data Kadastral	12
138.	Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Diseminasi Model Pemberdayaan	12
139.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I	12
140.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II	12
141.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah III	12
142.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah IV	12
143.	Kepala Subdirektorat Pengendalian Penerapan Kebijakan dan Program Pertanahan	12
144.	Kepala Subdirektorat Penguasaan Tanah Obyek Landreform dan Ganti Kerugian	12

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
145.	Kepala Subdirektorat Pengukuran Dasar dan Peralatan	12
146.	Kepala Subdirektorat Pengukuran Kadastral	12
147.	Kepala Subdirektorat Penilaian Bidang Tanah	12
148.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Evaluasi Penatagunaan Tanah	12
149.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Kemitraan	12
150.	Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Pedoman	12
151.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I	12
152.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II	12
153.	Kepala Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Nasional	12
154.	Kepala Subdirektorat Potensi dan Perencanaan	12
155.	Kepala Subdirektorat Potensi Tanah Terlantar	12
156.	Kepala Subdirektorat PPAT	12
157.	Kepala Subdirektorat Redistribusi Tanah dan Pemanfaatan Bersama	12
158.	Kepala Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah I	12
159.	Kepala Subdirektorat Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah II	12
160.	Kepala Subdirektorat Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi	12
161.	Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan	12
162.	Kepala Subdirektorat Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	12
163.	Kepala Seksi Analisis Pemanfaatan Tanah Terlantar	9
164.	Kepala Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Jawa dan Bali	9
165.	Kepala Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	9
166.	Kepala Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	9
167.	Kepala Seksi Bina Kota dan Perkotaan Wilayah Sumatera	9
168.	Kepala Seksi Bina Pelaksanaan Pengadaan	9
169.	Kepala Seksi Bina Pengendalian Pemanfaatan Ruang	9
170.	Kepala Seksi Bina Penilai Tanah	9
171.	Kepala Seksi Bina Perencanaan dan Persiapan	9
172.	Kepala Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Jawa dan Bali	9
173.	Kepala Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Kalimantan dan Sulawesi	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
174.	Kepala Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	9
175.	Kepala Seksi Bina Provinsi dan Kabupaten Wilayah Sumatera	9
176.	Kepala Seksi Data Penatagunaan Tanah	9
177.	Kepala Seksi Data, Informasi, dan Kemitraan	9
178.	Kepala Seksi Diseminasi Model Pemberdayaan	9
179.	Kepala Seksi Evaluasi	9
180.	Kepala Seksi Evaluasi Penatagunaan Tanah	9
181.	Kepala Seksi Evaluasi Tanah Non Pertanian	9
182.	Kepala Seksi Evaluasi Tanah Pertanian	9
183.	Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Non Pemerintah	9
184.	Kepala Seksi Fasilitasi dan Kerja Sama Lembaga Pemerintah	9
185.	Kepala Seksi Ganti Kerugian Tanah Obyek Landreform	9
186.	Kepala Seksi Identifikasi dan Inventarisasi Potensi	9
187.	Kepala Seksi Identifikasi Potensi Tanah Terlantar	9
188.	Kepala Seksi Informasi Data Dasar	9
189.	Kepala Seksi Informasi Data Kadastral	9
190.	Kepala Seksi Inventarisasi Tanah Obyek Landreform	9
191.	Kepala Seksi Kawasan Perdesaan	9
192.	Kepala Seksi Kawasan Perkotaan	9
193.	Kepala Seksi Kendali Mutu Nilai Ekonomi Kawasan	9
194.	Kepala Seksi Kendali Mutu Zona Nilai Tanah	9
195.	Kepala Seksi Kerja Sama	9
196.	Kepala Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IA	9
197.	Kepala Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IB	9
198.	Kepala Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IIA	9
199.	Kepala Seksi Konflik Tanah dan Ruang Wilayah IIB	9
200.	Kepala Seksi Neraca Penatagunaan Tanah	9
201.	Kepala Seksi Pedoman	9
202.	Kepala Seksi Pedoman Keterpaduan Pemanfaatan Ruang	9
203.	Kepala Seksi Pedoman Penataan Kawasan	9
204.	Kepala Seksi Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan	9
205.	Kepala Seksi Pedoman Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kawasan Perdesaan	9
206.	Kepala Seksi Pemanfaatan Bersama	9
207.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Nasional dan Kepulauan	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
208.	Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Pulau	9
209.	Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah	9
210.	Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Instansi	9
211.	Kepala Seksi Pemantauan	9
212.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang	9
213.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Badan Usaha Pemerintah	9
214.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Tanah Instansi	9
215.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Pulau-Pulau Kecil	9
216.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu	9
217.	Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Wilayah Pesisir	9
218.	Kepala Seksi Pemantauan Tanah Non Pertanian	9
219.	Kepala Seksi Pemantauan Tanah Pertanian	9
220.	Kepala Seksi Pembinaan Surveyor	9
221.	Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang Wilayah I	9
222.	Kepala Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Ruang Wilayah II	9
223.	Kepala Seksi Pemetaan Bidang Tanah	9
224.	Kepala Seksi Pemetaan dan Analisis Tematik Pertanahan	9
225.	Kepala Seksi Pemetaan Dasar	9
226.	Kepala Seksi Pemetaan Ruang dan Perairan	9
227.	Kepala Seksi Pemetaan Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi	9
228.	Kepala Seksi Pemetaan Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	9
229.	Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah I	9
230.	Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah II	9
231.	Kepala Seksi Penanganan Perkara Perdata Wilayah III	9
232.	Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I	9
233.	Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah II	9
234.	Kepala Seksi Penanganan Perkara Tata Usaha Negara Wilayah III	9
235.	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IA	9



NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
236.	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IB	9
237.	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IIA	9
238.	Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah dan Ruang Wilayah IIB	9
239.	Kepala Seksi Penataan	9
240.	Kepala Seksi Penataan Pulau-Pulau Kecil	9
241.	Kepala Seksi Penataan Wilayah Perbatasan dan Wilayah Tertentu	9
242.	Kepala Seksi Penataan Wilayah Pesisir	9
243.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IA	9
244.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IB	9
245.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IIA	9
246.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pembatalan Wilayah IIB	9
247.	Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang Wilayah I	9
248.	Kepala Seksi Pendaftaran Hak Tanah dan Ruang Wilayah II	9
249.	Kepala Seksi Pendampingan Pemberdayaan Hak Atas Tanah Masyarakat	9
250.	Kepala Seksi Penertiban Pemanfaatan Ruang	9
251.	Kepala Seksi Penertiban Tanah Terlantar	9
252.	Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal, dan Perpanjangan Hak Wilayah I	9
253.	Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Ruang, Hak Komunal, dan Perpanjangan Hak Wilayah II	9
254.	Kepala Seksi Penetapan Hak Atas Tanah	9
255.	Kepala Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah I	9
256.	Kepala Seksi Penetapan Hak Guna Usaha Wilayah II	9
257.	Kepala Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah I	9
258.	Kepala Seksi Penetapan Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Wilayah II	9
259.	Kepala Seksi Penetapan Hak Pengelolaan	9
260.	Kepala Seksi Penetapan Tanah Terlantar	9
261.	Kepala Seksi Pengadaan dan Kendali Mutu Penilaian Bidang Tanah dan Properti	9
262.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Landreform	9
263.	Kepala Seksi Pengelolaan Data Tanah Terlantar	9
264.	Kepala Seksi Pengembangan Model Pemberdayaan	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
265.	Kepala Seksi Pengendalian Penerapan Kebijakan Pertanahan	9
266.	Kepala Seksi Pengendalian Program Pertanahan	9
267.	Kepala Seksi Penguasaan Tanah Obyek Landreform	9
268.	Kepala Seksi Pengukuran Bidang Tanah	9
269.	Kepala Seksi Pengukuran Dasar	9
270.	Kepala Seksi Pengukuran Ruang dan Perairan	9
271.	Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil	9
272.	Kepala Seksi Peralatan	9
273.	Kepala Seksi Perencanaan	9
274.	Kepala Seksi Perencanaan Konsolidasi Tanah	9
275.	Kepala Seksi Perencanaan Penatagunaan Tanah	9
276.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara	9
277.	Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional, Pulau, dan Kepulauan	9
278.	Kepala Seksi Perencanaan Umum dan Monitoring Evaluasi	9
279.	Kepala Seksi Peruntukan Tanah Terlantar	9
280.	Kepala Seksi Potensi Obyek Konsolidasi Tanah	9
281.	Kepala Seksi PPAT Wilayah I	9
282.	Kepala Seksi PPAT Wilayah II	9
283.	Kepala Seksi Redistribusi Tanah	9
284.	Kepala Seksi Sinkronisasi Data Dasar	9
285.	Kepala Seksi Sinkronisasi Data Kadastral	9
286.	Kepala Seksi Survei Tematik Agraria dan Sosial Ekonomi	9
287.	Kepala Seksi Survei Tematik Pertanahan	9
288.	Kepala Seksi Survei Tematik Tata Ruang, Perbatasan dan Wilayah Tertentu	9
289.	Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penataan Kawasan Baru	9
290.	Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penataan Kawasan Ekonomi	9
291.	Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penataan Kawasan Perdesaan	9
292.	Kepala Seksi Wilayah I Subdirektorat Penataan Kawasan Perkotaan	9
293.	Kepala Seksi Wilayah IA Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I	9
294.	Kepala Seksi Wilayah IA Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
295.	Kepala Seksi Wilayah IB Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I	9
296.	Kepala Seksi Wilayah IB Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah I	9
297.	Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penataan Kawasan Baru	9
298.	Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penataan Kawasan Ekonomi	9
299.	Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penataan Kawasan Perdesaan	9
300.	Kepala Seksi Wilayah II Subdirektorat Penataan Kawasan Perkotaan	9
301.	Kepala Seksi Wilayah IIA Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II	9
302.	Kepala Seksi Wilayah IIA Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II	9
303.	Kepala Seksi Wilayah IIB Subdirektorat Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II	9
304.	Kepala Seksi Wilayah IIB Subdirektorat Perencanaan Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Wilayah II	9
305.	Kepala Seksi Zona Nilai Ekonomi Kawasan	9
306.	Kepala Seksi Zona Nilai Tanah	9
307.	Kepala Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah I	9
308.	Kepala Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah II	9
309.	Kepala Subbagian Mutasi Kepegawaian Wilayah III	9
310.	Kepala Subbagian Tata Laksana	9
311.	Kepala Subbagian Organisasi	9
312.	Kepala Subbagian Analisis Jabatan	9
313.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Sistem Informasi Kepegawaian	9
314.	Kepala Subbagian Penegakan Disiplin dan Kode Etik	9
315.	Kepala Subbagian Karir Jabatan Struktural dan Fungsional	9
316.	Kepala Subbagian Penilaian Kompetensi Pegawai	9
317.	Kepala Subbagian Pengamanan	9
318.	Kepala Subbagian Tata Laksana Keuangan dan Tata Usaha Biro	9
319.	Kepala Subbagian Advokasi Hukum	9
320.	Kepala Subbagian Akademik dan Pengajaran	9
321.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I	9
322.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II	9
323.	Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan III	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
324.	Kepala Subbagian Anggaran dan PNBP I	9
325.	Kepala Subbagian Anggaran dan PNBP II	9
326.	Kepala Subbagian Anggaran dan PNBP III	9
327.	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum	9
328.	Kepala Subbagian Evaluasi	9
329.	Kepala Subbagian Evaluasi Kinerja	9
330.	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Media Center	9
331.	Kepala Subbagian Hukum	9
332.	Kepala Subbagian Hukum dan Evaluasi Kinerja	9
333.	Kepala Subbagian Kearsipan	9
334.	Kepala Subbagian Kemahasiswaan dan Alumni	9
335.	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
336.	Kepala Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga	9
337.	Kepala Subbagian Kerja Sama Dalam Negeri	9
338.	Kepala Subbagian Kerja Sama Luar Negeri	9
339.	Kepala Subbagian Keuangan	9
340.	Kepala Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara	9
341.	Kepala Subbagian Keuangan dan Kepegawaian	9
342.	Kepala Subbagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai	9
343.	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan	9
344.	Kepala Subbagian Layanan Pengaduan dan Penyuluhan Masyarakat	9
345.	Kepala Subbagian Organisasi dan Tata Laksana	9
346.	Kepala Subbagian Pemantauan	9
347.	Kepala Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah I	9
348.	Kepala Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah II	9
349.	Kepala Subbagian Penatausahaan BMN Wilayah III	9
350.	Kepala Subbagian Pencairan Anggaran	9
351.	Kepala Subbagian Pendidikan dan Kerjasama	9
352.	Kepala Subbagian Pengadaan dan Pengembangan Kapasitas Pegawai	9
353.	Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara	9
354.	Kepala Subbagian Pengelolaan Gedung dan Kendaraan Dinas	9
355.	Kepala Subbagian Penyimpanan, Distribusi dan Pelaporan	9
356.	Kepala Subbagian Penyusunan Laporan	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
357.	Kepala Subbagian Perbendaharaan	9
358.	Kepala Subbagian Perbendaharaan, Verifikasi, dan Pelaporan	9
359.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Umum	9
360.	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran I	9
361.	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran II	9
362.	Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran III	9
363.	Kepala Subbagian Perencanaan Strategis	9
364.	Kepala Subbagian Perencanaan Strategis dan Kerja Sama	9
365.	Kepala Subbagian Perencanaan Umum	9
366.	Kepala Subbagian Perlengkapan	9
367.	Kepala Subbagian Pertimbangan dan Konsultasi Hukum	9
368.	Kepala Subbagian Perundang-undangan I	9
369.	Kepala Subbagian Perundang-undangan II	9
370.	Kepala Subbagian Perundang-undangan III	9
371.	Kepala Subbagian Program	9
372.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	9
373.	Kepala Subbagian Protokol	9
374.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	9
375.	Kepala Subbagian Sistem dan Standardisasi	9
376.	Kepala Subbagian Tata Persuratan	9
377.	Kepala Subbagian Tata Usaha	9
378.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro	9
379.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kearsipan	9
380.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	9
381.	Kepala Subbagian Tata Usaha Menteri/Kepala	9
382.	Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal	9
383.	Kepala Subbagian Tata Usaha Staf Ahli	9
384.	Kepala Subbagian Umum dan Rumah Tangga	9
385.	Kepala Subbagian Urusan Dalam	9
386.	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pelaporan	9
387.	Kepala Subbidang Kerja Sama	9
388.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural dan Fungsional	9
389.	Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
390.	Kepala Subbidang Pengelolaan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	9
391.	Kepala Subbidang Pengelolaan Data Pertanahan dan Tata Ruang	9
392.	Kepala Subbidang Pengembangan Sistem Teknologi Informasi	9
393.	Kepala Subbidang Penyajian Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	9
394.	Kepala Subbidang Penyajian Informasi Pertanahan dan Tata Ruang	9
395.	Kepala Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan	9
396.	Kepala Subbidang Standarisasi Sistem Teknologi Informasi	9
397.	Kepala Subbidang Perpustakaan	9
398.	Kepala Subbidang Program	9
399.	Kepala Subbidang Publikasi	9
<b>KANTOR WILAYAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>		
1.	Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi	15
2.	Kepala Bagian Tata Usaha	12
3.	Kepala Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan	12
4.	Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	12
5.	Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan	12
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat	12
7.	Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa, Perkara dan Konflik Pertanahan	12
8.	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan	9
9.	Kepala Subbagian Kepegawaian	9
10.	Kepala Subbagian Umum dan Informasi	9
11.	Kepala Seksi Pengukuran dan Pemetaan	9
12.	Kepala Seksi Pemetaan Tematik	9
13.	Kepala Seksi Pengukuran Bidang	9
14.	Kepala Seksi Survey Potensi Tanah	9
15.	Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan	9
16.	Kepala Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum	9
17.	Kepala Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah	9
18.	Kepala Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT	9
19.	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah	9
20.	Kepala Seksi Penataan Kawasan Tertentu	9
21.	Kepala Seksi Landreform	9
22.	Kepala Seksi Konsolidasi Tanah	9
23.	Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan	9
24.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	9

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN
25.	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan	9
26.	Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan	9
KANTOR PERTANAHAN		
1.	Kepala Kantor Pertanahan	13
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	9
3.	Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan	9
4.	Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah	9
5.	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan	9
6.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan	9
7.	Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara	9
8.	Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan	8
9.	Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian	8
10.	Kepala Sub Seksi Pengukuran dan Pemetaan	8
11.	Kepala Sub Seksi Tematik dan Potensi Tanah	8
12.	Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah	8
13.	Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah	8
14.	Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak	8
15.	Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT	8
16.	Kepala Sub Seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu	8
17.	Kepala Sub Seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah	8
18.	Kepala Sub Seksi Pengendalian Pertanahan	8
19.	Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat	8
20.	Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan	8
21.	Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan	8

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Ttd.

FERRY MURSYIDAN BALDAN